

**Pidato Pernyataan Tahunan  
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,  
DR. R.M. Marty M. Natalegawa  
Jakarta, 4 Januari 2012**

---

Yang kami hormati, Bapak Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Luar Negeri RI periode 1978 – 1988,

Yang kami hormati, Bapak Mahfudz Shiddiq, Ketua Komisi I, DPR RI,

Yang kami hormati, Bapak Hayono Isman, Wakil Ketua Komisi I, DPR RI,

Yang kami hormati, rekan-rekan pers, para duta besar Negara sahabat, para undangan, dan seluruh jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri,

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan darma bakti kita kepada negara yang kita cintai ini.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami atas nama pribadi, dan atas nama segenap jajaran Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk menyampaikan Selamat Tahun Baru 2012 kepada hadirin.

Kita senantiasa berharap, agar di tahun 2012 ini kita diberikan kesungguhan hati untuk bekerja lebih keras lagi dan berbuat yang lebih baik lagi bagi bangsa dan tanah air Indonesia.

Hadirin yang kami hormati,

Menutup tahun 2011 dan memasuki awal tahun 2012, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang mendalam atas seluruh kepedulian dan dukungan yang diberikan pada pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri selama ini.

Tentunya, seluruh hasil dan capaian pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2011 tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termaksud.

Hadirin yang kami hormati,

Sepanjang tahun 2011, kita menyaksikan kondisi internasional yang semakin kompleks dan dipenuhi ketidakpastian.

Tantangan multidimensi baik di bidang politik, keamanan maupun ekonomi telah menjadi ciri situasi internasional tahun 2011.

Tantangan yang bersifat tradisional maupun non tradisional, saling terkait dan bersifat lintas batas.

Bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun masalah dan tantangan yang kita hadapi saat ini yang luput dimensi politik luar negerinya.

Hal ini disebabkan setidaknya oleh dua hal yaitu: pertama, dampak dari tantangan tersebut sangat kompleks dan lintas batas.

Kedua, tidak ada satu negarapun yang mampu menyelesaikan tantangan dan situasi termaksud secara sendiri.

Kerjasama internasional mutlak dibutuhkan.

Hadirin yang kami hormati,

Di saat yang sama, kita juga menyaksikan perubahan yang cepat dan dinamis serta adanya ketidakpastian yang menyelimuti kondisi global sepanjang tahun 2011.

Ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun politik dan keamanan.

Satu-satunya kepastian sepanjang tahun 2011 adalah ketidakpastian itu sendiri.

Hadirin yang kami hormati,

Ini adalah gambaran umum, lingkungan global dan kawasan yang dihadapi oleh diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2011.

Dalam menghadapi keadaan ini, diplomasi dapat memberikan kontribusi.

Bukan saja untuk mengatasi berbagai tantangan melainkan menciptakan peluang.

Dalam menyikapi kondisi termaksud, Indonesia senantiasa konsisten mengelola perubahan "*managing change*" dan mendorong adanya perubahan kearah yang lebih baik "*promoting change*".

Dua hal inilah yang sesungguhnya dilakukan Indonesia sepanjang tahun 2011.

Untuk itu, diplomasi Indonesia tidak hanya bersifat responsif, namun juga bersifat antisipatif.

Indonesia senantiasa memproyeksikan kepemimpinan dalam penanganan berbagai tantangan di kawasan dan global.

Kebijakan polugri yang diambil sepanjang tahun 2011, senantiasa berjangkar pada kepentingan nasional yang disemangati prinsip kemitraan dan kesetaraan.

Indonesia senantiasa mengupayakan adanya solusi, menjembatani perbedaan kearah kesepahaman dan mendorong terwujudnya konsensus terhadap tantangan yang dihadapi bersama.

Kebijakan polugri diambil didasarkan pada pendekatan yang prinsipil, visioner, namun pragmatis dan antisipatif dalam merespons berbagai perkembangan kawasan dan global.

Semua dilakukan untuk mengelola perubahan dan dinamika yang terjadi; di saat yang sama senantiasa mendorong adanya perubahan kearah perbaikan.

Sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, politik luar negeri Indonesia senantiasa mengedepankan kemandirian dalam bersikap dan bertindak.

Semuanya dilakukan semata untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Kepentingan nasional sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD 1945;

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

memajukan kesejahteraan umum;

mencerdaskan kehidupan bangsa;

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hadirin yang kami hormati,

Mengawali pelaksanaan politik luar negeri pada tahun 2012 ini, kita meyakini tantangan global dan kawasan diperkirakan tidak semakin kecil, melainkan semakin meningkat.

Ketidakpastian diperkirakan pula masih akan mewarnai kondisi pada tingkat global maupun kawasan.

Ditengah kondisi global dan kawasan yang semakin kompleks, Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen, niat dan kesungguhan yang kuat untuk melanjutkan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai pada tahun lalu.

Diplomasi Indonesia akan tetap berupaya mengelola perubahan dan mendorong adanya perubahan guna menciptakan kondisi yang kondusif dimana seluruh pihak dapat menikmati keamanan bersama (common security), stabilitas bersama (common stability) dan kemakmuran bersama (common prosperity).

Indonesia secara gigih akan berjuang untuk perdamaian dan kemakmuran (waging peace and prosperity).

Sesungguhnya, perkembangan yang terjadi pada tahun 2011 telah membuktikan komitmen dimaksud dan pada tahun 2012, ini akan terus menjadi platform diplomasi dan politik luar negeri Indonesia.

Hadirin yang kami hormati,

Sepanjang tahun 2011, Indonesia memberikan perhatian yang besar pada peningkatan hubungan dengan negara-negara sahabat.

Upaya untuk memperdalam dan memperluas kerjasama bilateral senantiasa dikembangkan berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan dan saling menguntungkan.

Sepanjang tahun 2011, telah dilakukan penajaman prioritas-prioritas kerjasama dengan negara-negara mitra strategis dan komprehensif Indonesia, dan mengidentifikasi negara-negara sahabat yang berpotensi menjadi mitra strategis Indonesia.

Sesuai dengan arahan dan instruksi Bapak Presiden, pada tahun 2011 telah diidentifikasi 3-5 bidang prioritas dan target-target kerjasama ekonomi pada masing-masing negara dimana Indonesia memiliki kemitraan strategis dan komprehensif.

Prioritas dan target dimaksud akan menjadi semacam tolok ukur pencapaian mesin diplomasi dan politik luar negeri.

Selain itu, sepanjang tahun 2011 dilakukan berbagai upaya untuk penguatan mekanisme kerjasama bilateral dengan negara-negara sahabat.

Penguatan mekanisme bilateral dilakukan dengan merevitalisasikan mekanisme bilateral dengan sejumlah negara dan atau mempertajam mekanisme yang sudah berjalan secara regular.

Pertemuan Komisi Bersama Tingkat Menteri dengan Filipina, Myanmar dan Laos yang telah vakum sejak tahun 2007 telah direvitalisasi.

Demikian halnya Komisi Bersama Tingkat Menteri dengan Brunei Darussalam telah direvitalisasi sejak pertemuan terakhir tahun 2003.

Secara sistematis, mekanisme yang telah direvitalisasi sejak tahun lalu, pada tahun 2011 ini dilakukan penajaman lebih lanjut misalnya dengan Timor Leste, Selandia Baru, Malaysia, Amerika Serikat dan Jepang.

Selain itu upaya peningkatan hubungan bilateral yang dilakukan sepanjang tahun 2011 juga tercermin pada intensitas yang sangat tinggi pertemuan bilateral yang dilakukan baik pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan maupun pada tingkat Menteri Luar Negeri.

Untuk membangun payung hukum peningkatan kerjasama dengan negara-negara sahabat, sepanjang tahun 2011 Pemerintah Indonesia telah menandatangani setidaknya 146 perjanjian internasional, dimana 131 diantaranya adalah perjanjian bilateral.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi 26 perjanjian, dimana hampir 90% merupakan perjanjian bilateral dan lebih dari 60% diantaranya adalah di bidang perekonomian.

Ke depan, tentunya berbagai kesepakatan dimaksud menuntut kerja keras seluruh pihak untuk dapat mengimplementasikannya.

Diplomasi ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari diplomasi bilateral Indonesia. Upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi dengan negara-negara sahabat merupakan salah satu prioritas diplomasi Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk memastikan adanya peningkatan volume dan kualitas perdagangan Indonesia dengan negara sahabat, khususnya dengan negara mitra strategis, telah dibuat target perdagangan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja diplomasi ekonomi.

Perwakilan RI di luar negeri menjadi tulang punggung upaya diplomasi ekonomi Indonesia.

Untuk memperdalam dan memperluas pasar tradisional Indonesia.

Di saat yang sama mengidentifikasi lebih lanjut pasar non tradisional.

Upaya ini semakin penting dalam kondisi ekonomi global yang masih belum menentu.

Berbagai bentuk diplomasi ekonomi dilakukan Perwakilan RI di seluruh penjuru dunia dari Azerbaijan hingga Zimbabwe; dari Selandia Baru hingga Republik Rakyat Tiongkok.

Penyelenggaraan pameran produk Indonesia di luar negeri; mendatangkan pengusaha negara sahabat ke Indonesia; mempromosikan pembentukan forum bisnis antara pengusaha kedua negara; adalah beberapa langkah nyata diplomasi ekonomi Indonesia.

Hasil positif telah kita saksikan dan rasakan bersama. Sepanjang tahun 2011 misalnya, nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan hampir semua negara-negara sahabat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010.

Volume perdagangan dengan 13 negara mitra strategis misalnya mencatat peningkatan yang cukup tajam rata-rata di atas 50 persen.

Hadirin yang kami hormati,

Sesuai komitmen untuk memperluas hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota PBB, sepanjang tahun 2011, Indonesia telah membuka hubungan diplomatik dengan sembilan negara yaitu Mauritania, El Salvador, San Marino, Montenegro, Republik Dominika, Niger, Sao Tome and Principe, Antigua and Barbuda dan Bhutan.

Sembilan negara yang baru dibuka sekaligus sepanjang tahun 2011 ini, merupakan bagian dari sisa 21 negara dimana Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik. Dibukanya hubungan diplomatik dengan 21 negara nantinya, praktis Indonesia akan memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota PBB yang berjumlah 193 negara.

Di saat yang sama, tercatat 5 negara telah membuka perwakilan asing di Jakarta yaitu Fiji, Kolombia, Belarus, Paraguay dan Konsulat Jenderal RRT di Medan.

Pada tahun 2011, sebanyak 16 negara yang membuka kantor perwakilan negaranya untuk ASEAN di Jakarta. Hingga akhir tahun 2011, tercatat 61 negara yang telah memiliki Wakil Tetap untuk ASEAN. Pada tahun 2012 ini, beberapa negara telah merencanakan membuka perwakilan di Jakarta antara lain Vanuatu dan Georgia.

Hal ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia khususnya Jakarta, sebagai salah satu *diplomatic capital* bagi kawasan Asia Timur.

Hadirin yang kami hormati,

Pada tahun 2012 mendatang, Indonesia akan tetap memberikan perhatian besar bagi diplomasi bilateral.

Kerjasama dengan negara-negara mitra strategis akan terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan peluang-peluang yang saling menguntungkan termasuk memonitor implementasi bidang prioritas yang telah ditetapkan.

Mekanisme bilateral yang telah ada akan dipertajam dan dibuat lebih komprehensif dengan melibatkan pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Target perdagangan yang telah ditetapkan akan menjadi semacam *score card* bagi setiap perwakilan untuk dapat mencapainya.

Merupakan kewajiban perwakilan RI, untuk memperluas pasar ekspor Indonesia guna mendukung nilai ekspor yang dicanangkan Indonesia pada tahun 2012 ini yaitu 230 miliar dollar AS.

Kementerian Luar Negeri juga telah menginstruksikan kepada seluruh perwakilan untuk secara aktif mendorong investasi asing yang bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia sesuai dengan MP3EI yang telah dimiliki Indonesia.

Perwakilan RI di luar negeri juga harus berkontribusi bagi pencapaian target wisatawan manca Negara sebesar 8 juta jiwa di tahun 2012.

Seluruh ukuran-ukuran tersebut sangat jelas untuk menjadi target setiap perwakilan.

Untuk mempertajam diplomasi bilateral, sesuai instruksi Bapak Presiden, pada paruh pertama tahun 2012 di Jakarta, akan dilakukan rapat kerja seluruh kepala perwakilan RI guna mengkaji upaya yang sistematis peningkatan hubungan bilateral dengan setiap Negara.

Hadirin yang terhormat,

Diplomasi di kawasan juga merupakan pilar penting diplomasi Indonesia.

Diplomasi bilateral ataupun regional dapat saling melengkapi dan saling mengisi.

Keduanya saling terkait erat.

Diplomasi Indonesia dalam mengembangkan kerjasama kawasan senantiasa mengedepankan pengembangan arsitektur kawasan yang memungkinkan kerjasama dalam menjawab tantangan-tantangan keamanan bersama baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. *Tantangan atau ancaman bersama* di kawasan bukanlah sebuah negara tertentu, melainkan isu bersama bersama seperti pengentasan kemiskinan, kelestarian lingkungan, penanganan bencana alam dan pemberantasan kejahatan lintas batas.

Indonesia juga senantiasa mendorong terciptanya "*dynamic equilibrium*" di kawasan berdasarkan pendekatan yang menggarisbawahi prinsip *common stability, common security dan common prosperity* di antara negara-negara di kawasan.

Hal ini tidak lain untuk mewujudkan kawasan yang damai, aman dan stabil sehingga memungkinkan negara-negara di kawasan, khususnya Indonesia, untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hadirin yang terhormat,

Keketuaan Indonesia pada tahun 2011 memberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan arsitektur kawasan yang sedang berkembang.

Sepanjang tahun 2011, sebagaimana tahun dimana Indonesia menjadi Ketua ASEAN, Indonesia senantiasa menunjukkan kepemimpinan atau *leadershipnya* bukan hanya menjadi semata ketua ASEAN.

Menjadi Ketua ASEAN adalah masalah rotasi keketuaan; namun kepemimpinan ASEAN menuntut memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Komunitas ASEAN yang tidak hanya berhenti pada saat berakhirnya keketuaan, namun berlanjut kedepan.

Itulah yang ditunjukkan Indonesia selama menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2011 ini.

Indonesia membuat perbedaan; *made a difference*.

Indonesia berupaya merubah kondisi dari keadaan sebelumnya kearah yang lebih baik.

Sejak mengemban amanat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011, selaras dengan tema "ASEAN Community in a global community of nations" Indonesia telah mengidentifikasi 3 prioritas keketuaan Indonesia yang juga telah dikukuhkan sebagai prioritas ASEAN tahun 2011; yaitu:

memastikan adanya kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN;

menciptakan kawasan yang kondusif bagi pembangunan;

menggulirkan visi ASEAN pasca 2015 yaitu peran ASEAN yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan global yaitu sikap ASEAN dalam berbagai isu global.

Ketiga prioritas inilah yang senantiasa menjadi rujukan seluruh kerja keras Negara ASEAN khususnya Indonesia sebagai Ketua.

Di bawah masa keketuaan Indonesia, kita dapat menyaksikan kawasan Asia Tenggara yang semakin aman, damai, stabil dan makmur.

Dalam satu tahun terakhir ini, misalnya di bidang politik dan keamanan, Indonesia telah secara signifikan memperkuat kapasitas ASEAN untuk mengelola konflik di antara negara-negara anggota.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah ASEAN, pengelolaan konflik di antara negara anggota melibatkan langsung ASEAN.

Jika sebelumnya, ASEAN selalu dipertanyakan kemampuan untuk mengelola konflik yang kemungkinan muncul diantara Negara anggotanya, semasa keketuaan Indonesia, bukan hanya ASEAN menunjukkan kemampuannya dalam mengelola konflik, namun kemampuan ASEAN ini diakui oleh masyarakat internasional termasuk di dalamnya DK PBB dan Mahkamah Internasional.

Di bawah Keketuaan Indonesia tahun 2011, upaya untuk mendorong demokrasi, HAM dan tata kelola pemerintahan menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Kemajuan yang signifikan pada proses demokrasi yang dilakukan Myanmar pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir tidak terbantahkan.

Indonesia senantiasa berupaya berkontribusi terhadap kondisi yang kondusif bagi bergulirnya proses transformasi politik dan demokrasi di Myanmar, termasuk memastikan agar pengakuan Myanmar untuk menjadi Ketua ASEAN tahun 2014 memberikan momentum positif sehingga proses demokrasi yang dilakukan Myanmar tidak terhenti apalagi berjalan mundur.

Kemajuan penting lainnya adalah berhasil dituntaskannya perundingan antara ASEAN dengan negara-negara pemilik senjata nuklir terkait akses negara-negara tersebut kedalam protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara.

Kemajuan yang berarti telah dicapai pada tahun 2011 ini setelah 10 tahun tidak terdapat kemajuan dalam perundingan.

Kesepakatan tersebut berarti lebih 600 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara bebas dari penggunaan dan ancaman penggunaan senjata nuklir.

Sebagai ketua ASEAN Indonesia telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan kawasan sekitar yang kondusif, stabil, aman dan damai.

Indonesia telah mampu mengelola potensi konflik di Laut China Selatan dengan memastikan tercapainya kesepakatan antara ASEAN dan China mengenai *Guidelines for the implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*.

Sebagaimana dimaklumi, pembahasan *guidelines* tersebut telah berlangsung sejak tahun 2005 dan baru berhasil dituntaskan atas dorongan dan kepemimpinan Indonesia pada tahun 2011 ini.

Selanjutnya dengan disepakatinya *guidelines* maka dengan prakarsa Indonesia pula, telah digulirkan pembahasan mengenai *Code of Conduct* yang sifatnya lebih mengikat dari Deklarasi tersebut.

Hal tersebut bukan saja memperlihatkan adanya kemajuan dalam proses perundingan, juga adalah adanya komitmen untuk mengedepankan kerjasama dan dialog dalam mengelola dan menyelesaikan masalah Laut China Selatan.

Indonesia juga telah mampu menegaskan kembali relevansi forum *ASEAN Regional Forum* untuk membahas isu-isu keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Di sela-sela pertemuan ARF tahun 2011 di Bali misalnya, Indonesia membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan pertemuan delegasi Korea Utara dan Korea Selatan yang diikuti interaksi Menlu kedua negara.

Di bawah keketuaan Indonesia, upaya untuk memberikan makna dan bentuk konkrit peran sentral ASEAN dalam arsitektur kawasan terus dilakukan. Bersamaan dengan keikutsertaan Rusia dan AS

dalam *East Asia Summit* di Bali misalnya, Indonesia telah memajukan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan dan interaksi negara-negara kunci di Asia Timur.

Pada *East Asia Summit* di Bali, telah disepakati sebuah deklarasi yang memuat 12 prinsip-prinsip dasar interaksi negara-negara kunci di Asia Timur yang disebut dengan *Bali Principles*.

Prinsip tersebut menyangkut pemeliharaan hubungan bersahabat antar negara sebagaimana misalnya tercermin dalam *Treaty of Amity and Cooperation*.

Dengan disepakatinya *Bali Principles* misalnya, terdapat komitmen diantara 18 negara EAS untuk tidak akan menggunakan kekerasan dan ancaman penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara Negara EAS.

Dalam ranah ekonomi dan pembangunan, keketuaan Indonesia di ASEAN bersamaan dengan kondisi ekonomi global yang masih rapuh akibat dampak krisis global pada tahun 2008 dan 2009.

Kondisi ini diperparah dengan adanya krisis di Eurozone yang menyebabkan fundamental ekonomi beberapa Negara di kawasan Eropa runtuh.

Selama masa keketuaan Indonesia di ASEAN, berbagai upaya dilakukan untuk memastikan setidaknya dua hal:

Pertama, memastikan agar krisis ekonomi khususnya di kawasan Eropa tidak berdampak negatif terhadap kawasan ASEAN dan Asia Timur.

Kedua, memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif di kawasan sehingga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan.

Selama 2011, berbagai inisiatif telah digulirkan Indonesia selaku Ketua ASEAN.

Kita telah menyaksikan penandatanganan perjanjian *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)* oleh para Menteri Pertanian ASEAN.

Hal ini untuk memastikan adanya mekanisme kawasan yang baku untuk menjamin pasokan pangan di kawasan. Tentunya, ini menjadi bagian penting untuk menciptakan ketahanan pangan di kawasan.

Untuk mendorong ASEAN menjadi pusat pertumbuhan di Asia dan dunia, Negara-negara ASEAN aktif membangun kerjasama dengan mitra wicara maupun organisasi internasional lainnya dalam bidang Konektivitas.

Melalui implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity*, arus perdagangan maupun modal di kawasan akan menjadi jauh lebih baik, sehingga mendukung ASEAN menjadi lebih kompetitif dalam memasuki perekonomian global.

Selama menjadi Ketua ASEAN, Indonesia juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dengan disahkannya "the ASEAN Framework for Equitable Economic Development".

Melalui Framework ini, partisipasi masyarakat yang lebih luas lagi dalam memperoleh manfaat dari berbagai kerjasama akan semakin meningkat.

Di bidang sosial dan budaya, tema utama keketuaan Indonesia tahun 2011 adalah masyarakat ASEAN yang lebih peduli (*caring society*) dan *people-centered* ASEAN.

Masyarakat ASEAN yang lebih peduli terhadap aspek kemanusiaan menandai keketuaan Indonesia pada tahun 2011 baik kepada sesama negara ASEAN maupun dengan Negara mitra lainnya.

Menyadari bahwa Indonesia dan negara ASEAN merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bencana, maka penguatan kapasitas negara ASEAN dalam mengatasi bencana menjadi prioritas Indonesia.

*ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on disaster management* diluncurkan dibawah keketuaan Indonesia.

Dikembangkan pula konsep bersama Indonesia dan Australia dalam kerangka EAS untuk mempercepat Bantuan kemanusiaan dan *debottlenecking response* dalam fase *emergency relief* negara yang terkena bencana alam.

Kepedulian baik kepada sesama Negara ASEAN dan Negara lainnya dalam menghadapi bencana juga ditunjukkan di bawah keketuaan Indonesia.

Saat terjadi gempa bumi dan Tsunami di Jepang misalnya, Negara ASEAN memobilisasi bantuan kemanusiaan bagi Jepang untuk mengatasi dampak bencana alam yang dihadapi dengan menggelar pertemuan darurat Menlu ASEAN dan Jepang dalam merespon bencana di Jepang.

Dalam bidang sosial budaya pula, dialog antara Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dengan *civil society organization* dimulai kembali.

Di bawah masa keketuaan Indonesia, forum CSO juga dilakukan dan dihadiri oleh wakil dari Negara anggota ASEAN seluruhnya serta dibuka oleh Bapak Wakil Presiden.

Beberapa kesepakatan lain di bidang sosial dan budaya yang mendekatkan ASEAN dengan masyarakatnya juga dicapai. Di bidang pemuda dan olahraga, bidang hak anak dan perempuan, bidang pekerja migran dan juga penyakit menular dan keragaman identitas masyarakat ASEAN.

Berbagai kegiatan dan program yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat juga mewarnai kegiatan masyarakat ASEAN sepanjang tahun 2011 yaitu *ASEAN Fair*, peringatan HUT ASEAN, *ASEAN Culinary Festival* serta *ASEAN Youth Cultural Exchange Festival* dan pembentukan *ASEAN Bloggers forum* diantaranya.

Hadirin yang berbahagia,

Indonesia telah menggulirkan visi ASEAN pasca 2015 yaitu platform bersama ASEAN dalam berbagai isu global pada tahun 2022.

Sebagai ketua ASEAN tahun 2011, Indonesia berketetapan agar kontribusi Indonesia tidak terhenti setelah selesai masa keketuaannya, namun dapat berlanjut setelah itu.

Dalam perjalanan ASEAN sepanjang 4 dekade, setiap kali Indonesia menjadi Ketua ASEAN senantiasa menorehkan sejarah dengan membawa ASEAN ke tahap yang lebih tinggi:

Pada tahun 1976 misalnya, di Bali telah disepakati ASEAN Concord terkait dengan Treaty of Amity and Cooperation.

Pada tahun 2003, juga di Bali, disepakati ASEAN Concord II terkait pembentukan ASEAN Community.

Dan pada tahun 2011 ini, telah disepakati Bali Concord III terkait dengan ASEAN Community in a global community of nations.

Dalam deklarasi Bali Concord III, seluruh Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN telah menyepakati sebuah komitmen untuk meningkatkan peran ASEAN yang lebih kohesif dalam penyelesaian tantangan global.

Salah satu dokumen yang juga telah disepakati terkait dengan peran ASEAN dalam komunitas global bangsa-bangsa adalah Deklarasi Kemitraan Strategis ASEAN-PBB.

Hadirin yang berbahagia,

Pada tahun 2012, Indonesia akan terus memastikan dilanjutkannya ketiga prioritas ASEAN sebagaimana telah ditetapkan Indonesia pada tahun 2011 dan dikukuhkan oleh ASEAN.

Beberapa isu utama yang menjadi kepentingan Indonesia pada tahun 2012 diantaranya adalah:

Kemajuan dalam pembahasan mengenai *Code of Conduct on South China Sea*;

Pengelolaan potensi konflik di kawasan;

Perkembangan proses demokrasi dan rekonsiliasi di Myanmar;

Penyelesaian akses Protokol SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir;

Peningkatan kerjasama maritim;

Implementasi mekanisme di kawasan dalam penanganan bencana alam, ketahanan pangan, ketahanan energi dan stabilitas perekonomian di kawasan;

*ASEAN Connectivity*;

Penguatan Bali Principles; dan

*Plan of action Bali Concord III*.

Selain kerjasama dengan ASEAN sebagai lingkaran terdekat, sebagai bagian dari kawasan Pasifik, Indonesia juga memperdalam kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik melalui Southwest Pacific Dialogue (SwPD) dan Pacific Islands Forum (PIF).

Sepanjang tahun 2011, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan dengan organisasi di kawasan Pasifik tersebut.

Perkembangan penting pada tahun 2011 adalah diterimanya Indonesia sebagai observer pada *Melanesian Spearhead Group* (MSG) pada KTT ke-18 MSG.

Diterimanya Indonesia sebagai observer pada MSG memungkinkan Indonesia meningkatkan kerjasama dan hubungan yang baik dengan Negara anggota MSG.

Sepanjang tahun 2011, Indonesia juga memberikan perhatian besar terhadap berbagai mekanisme kerja sama intra kawasan maupun antar kawasan seperti APEC, Asia-Europe Meeting (ASEM) dan Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) dimana Indonesia menjadi koordinator untuk kawasan Asia serta New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP).

Khusus dengan kawasan Eropa, kemitraan komprehensif yang telah dimiliki Indonesia telah mendorong hubungan yang setara dan saling menguntungkan dengan negara Uni Eropa. Indonesia akan segera meratifikasi kemitraan komprehensif dengan Uni Eropa yang memberikan roadmap kedepan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa.

Prioritas Indonesia dalam kerjasama kawasan lainnya pada tahun 2012 diantaranya adalah menyiapkan keketuaan Indonesia di APEC pada tahun 2013.

Selain tentunya mempersiapkan penyelenggaraan keketuaan APEC pada tahun 2013, Indonesia akan menciptakan momentum keketuaan Indonesia di APEC dengan penyiapan substansi dan prioritas Keketuaan Indonesia di APEC tahun 2013.

Selain APEC, Indonesia juga akan memberikan prioritas bagi penguatan peran dan kontribusi Indonesia di Pacific Island Forum (PIF). Ini merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai negara Pasifik untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan termaksud.

Kerjasama di kawasan Samudera Hindia juga merupakan salah satu prioritas Indonesia. Sebagai bagian dari inisiatif Indonesia untuk mendorong kerjasama maritim, pada tahun 2012, Indonesia juga akan memberikan perhatian yang besar pada kerjasama maritim di Samudera Hindia.

Hadirin yang kami hormati,

Diplomasi multilateral menjadi yang tidak terpisahkan dalam diplomasi dan politik luar negeri Indonesia.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan, bahwa tantangan global dewasa ini dan keterkaitan antara satu isu dan lainnya menuntut adanya kerjasama internasional.

Diplomasi multilateral Indonesia ditujukan untuk secara aktif ikut serta mengatasi masalah-masalah global khususnya yang memiliki dampak terhadap kepentingan nasional.

Sepanjang tahun 2011, partisipasi Bapak Presiden di forum seperti WEF Davos, WEF on East Asia Jakarta, G-20, dan APEC menegaskan perhatian Indonesia dalam membangun pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang dan berkelanjutan.

Melalui berbagai forum internasional baik di tataran regional maupun global seperti ASEAN, APEC dan G-20, Indonesia berkepentingan besar untuk memastikan empat sasaran diplomasi ekonomi:

pemulihan stabilitas ekonomi global, peningkatan pertumbuhan ekonomi, fasilitasi arus perdagangan dan investasi, serta dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Dalam kerjasama internasional pengelolaan hutan terkait perubahan iklim, di tahun 2011, Indonesia terus memanfaatkan forum kerjasama Forest Eleven yang merupakan inisiatif Presiden RI di tahun 2007. Melalui pertemuan Tingkat Menteri *Forest Eleven* yang diselenggarakan oleh Indonesia di sela-sela SMU PBB ke-66, keempat belas negara pemilik hutan tropis terus mendorong peningkatan kerjasama dan kemitraan yang efektif dalam pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan.

Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan PBB melalui pembentukan *United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia* (UNORCID) yang akan mendukung pelaksanaan program REDD+ di Indonesia secara terkoordinasi.

Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam isu-isu hak pekerja migran dan keragaman budaya dengan partisipasi Bapak Presiden yang juga dipercaya menjadi pembicara di forum ILO dan UNESCO.

Selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah KTM GNB dan peringatan 50 tahun GNB di Bali. Pada kesempatan tersebut, Bapak Presiden telah menyampaikan visi GNB untuk 50 tahun kedepan yang telah juga dikukuhkan oleh negara GNB.

Mendorong visi baru negara berkembang yang menjadi bagian dari *net contributor* pada keamanan, perdamaian, pembangunan, HAM serta demokrasi dan mendorong semangat kemitraan dalam menyelesaikan tantangan global.

Pada pertemuan GNB dimaksud, isu Palestina mendapatkan perhatian khusus. Atas usul dan prakarsa Indonesia, dalam pertemuan tersebut telah dihasilkan sebuah *roadmap* upaya mendapatkan pengakuan kemerdekaan Palestina dari negara anggota PBB.

Ini merupakan komitmen dan dukungan Indonesia bagi lahirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Pelaksanaan diplomasi multilateral dalam satu tahun terakhir telah semakin menegaskan ciri khas Indonesia, antara lain berupa kepemimpinan dalam mendorong kemajuan di berbagai bidang melalui upaya untuk membangun konsensus, pendekatan kooperatif, menjembatani perbedaan tanpa mengkompromikan kepentingan nasional, menonjolkan *convergence of interests*, konsisten dengan prinsip-prinsip multilateralisme, serta memprioritaskan kepentingan negara-negara berkembang secara umum.

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam fora internasional yang memberikan nilai tambah bagi upaya global dalam mengatasi berbagai tantangan telah menaikkan profil Indonesia, yang pada gilirannya menaikkan *leverage* Indonesia dalam diplomasi bilateral maupun regional.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana komitmen yang disampaikan pada awal tahun 2011, di bidang perlucutan senjata dan non-proliferasi misalnya, Indonesia terus memainkan perannya sebagai salah satu negara yang konsisten dalam memajukan perlucutan senjata dan non-proliferasi

Kepemimpinan Indonesia melalui ratifikasi CTBT pada tanggal 6 Desember 2011 disambut baik dan diapresiasi oleh masyarakat internasional.

Ratifikasi Indonesia tersebut bukan hanya mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari masyarakat internasional karena *leadership* Indonesia, tetapi semakin memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara lain dalam annex II untuk juga meratifikasi CTBT dimaksud.

Selain itu, komitmen Indonesia dalam memberikan kontribusi untuk menciptakan perdamaian dunia tidak terbantahkan termasuk melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian.

Komitmen Indonesia untuk meningkatkan kontribusi pasukan perdamaian di dunia baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya ditandai dengan peresmian *Peace Keeping Center* Indonesia di Sentul oleh Bapak Presiden pada akhir tahun 2011 ini.

Pusat pelatihan ini juga nantinya bukan hanya akan menjadi semacam *training ground* bagi pasukan Indonesia yang akan bertugas dalam misi perdamaian PBB, namun juga akan menjadi pusat pelatihan dan hub pasukan perdamaian di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia senantiasa meningkatkan profilnya dalam diplomasi multilateral di bidang Hak Asasi Manusia.

Pengakuan masyarakat internasional atas peran Indonesia di forum global mengenai hak asasi manusia tercermin sangat nyata pada saat pemungutan suara untuk keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2011-2014.

Indonesia telah memperoleh suara dukungan tertinggi di antara calon-calon yang terpilih lainnya, yaitu 184 suara.

Indonesia terus melakukan penyesuaian posisi mengenai berbagai isu HAM yang menyangkut situasi di negara-negara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari tahun ke tahun baik di Dewan HAM maupun di Majelis Umum PBB.

Indonesia juga telah berhasil memainkan peran yang penting dalam pembentukan suatu Komisi HAM yang permanen dan independen dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Indonesia juga telah membuat kemajuan berarti dalam memperkuat kerangka nasional untuk pemajuan dan perlindungan HAM, terutama dengan mengintegrasikan norma dan standar internasional dalam sistem nasional.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2011.

Indonesia juga telah merampungkan proses persiapan ratifikasi beberapa konvensi lainnya termasuk Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya dan Konvensi untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Hadirin yang kami hormati,

Sepanjang tahun 2011, Indonesia kembali mengukuhkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan dimana Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan baik dalam forum regional dan global.

Dalam berbagai forum global, Indonesia senantiasa diakui sebagai negara dalam barisan demokrasi dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

Indonesia konsisten dengan posisi yang prinsipil dalam menyikapi perkembangan demokrasi dan transformasi politik di kawasan Timur tengah dan Afrika Utara.

Di tingkat kawasan, Indonesia juga senantiasa mendorong proses demokrasi di kawasan Asia yang bertumpu pada pilar inklusif, *home-grown democracy* dan saling bertukar pengalaman dan praktek-praktek terbaik.

Sejak dimulai tahun 2008, penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) semakin mendapat apresiasi yang tinggi dari negara-negara di Asia maupun kawasan lain.

Forum ini juga telah berhasil menempatkan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan Asia dan menghasilkan banyak inisiatif kerja sama yang berdampak pada penguatan institusi demokrasi negara-negara di Asia.

Setelah 4 tahun terakhir, BDF telah menjadi bagian arsitektur demokrasi di kawasan yang telah diakui.

Untuk mengukuhkan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan, pada tahun 2012, setelah 5 tahun BDF, akan diselenggarakan Bali Democracy Forum pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan.

Indonesia terus memainkan peran penggerak untuk kerja sama kawasan dan global dalam peningkatan kapasitas respon dalam menanggulangi bencana.

Terkait dengan penajaman konsep peningkatan kapasitas respon terhadap bencana alam, Indonesia telah memberikan kontribusi positif dengan pelibatan pihak militer melalui ARF Direx dan kemampuan *bottlenecking* terhadap kemampuan kerjasama internasional dalam menghadapi bencana alam.

Konsep Indonesia dan Australia terkait dengan penajaman kapasitas respon dan kerjasama internasional telah diterima dan disepakati dalam forum EAS.

Pengalaman Indonesia telah menjadi model sukses penanganan bencana alam, baik di tatanan kebijakan maupun operasional.

Komitmen dan capaian Indonesia di bidang ini memperoleh pengakuan tertinggi di tingkat internasional dengan pemberian *Global Champion for Disaster Risk Reduction* kepada Presiden RI oleh Sekjen PBB di sela-sela KTT ASEAN-UN pada tanggal 19 November 2011.

Selain itu, pada tahun 2011 ini, Indonesia telah menunjukkan wujud kepedulian RI kepada negara sahabat terhadap bencana alam yang dihadapi beberapa Negara sahabat.

Kedepan, dengan semakin meningkatnya profil Indonesia di dunia internasional, pengelolaan bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis Indonesia akan semakin menjadi perangkat *soft power* diplomasi yang lebih terstruktur.

Pada tahun 2012, agenda diplomasi multilateral akan sangat penting dan substansial.

Dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional, KTT Nuclear Security Summit telah diagendakan untuk membahas lebih lanjut agenda perlucutan dan keamanan senjata nuklir di Seoul pada bulan Maret 2012.

Agenda pembangunan berkelanjutan dan ekonomi dunia akan dibahas dalam KTT Rio+20 dan KTT G-20 masing-masing di Brazil dan Meksiko pada bulan Juni 2012.

Indonesia akan senantiasa berperan aktif dan berkontribusi positif baik dalam proses persiapan KTT maupun pelaksanaan KTT.

Pada tahun 2012 ini pula, Indonesia akan terus memperjuangkan reformasi PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB, sehingga lebih mencerminkan realitas dunia dewasa ini dan masa mendatang. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menumbuhkembangkan tatanan hubungan antar negara yang lebih demokratis.

Hadirin yang kami hormati,

Salah satu prioritas dalam diplomasi adalah menuntaskan perundingan batas wilayah darat dan maritim baik yang bersifat delimitasi maupun demarkasi.

Sepanjang tahun 2011, Indonesia terus mengintensifkan upaya untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Setidaknya, telah dilakukan 38 kali perundingan perbatasan, dimana 16 kali adalah perundingan batas maritim dan 22 kali perundingan batas darat.

Pada tahun 2010 terdapat 23 kali perundingan.

Melalui upaya intensif yang dilakukan Indonesia selama ini mengenai batas Landas Kontinen di luar batas 200 mil laut di wilayah bagian barat laut Pulau Sumatera, akhirnya UN Commission in the Limits of the Continental Shelf (CLCS), telah merekomendasikan usulan perhitungan Indonesia yang menyetujui luas wilayah RI pada batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut di wilayah bagian barat laut Pulau Sumatera sebesar 4209 km<sup>2</sup> (kurang lebih seluas pulau Madura).

Ini merupakan capaian diplomasi perbatasan yang signifikan.

Dalam perundingan batas maritim dengan negara tetangga telah terdapat kemajuan dalam perundingan dengan Malaysia dan Singapura misalnya.

Upaya intensifikasi perundingan akan terus ditingkatkan dan diharapkan terdapat hasil sebagaimana yang diharapkan dalam proses perundingan pada tahun 2012.

Hadirin yang kami hormati.

Isu perlindungan WNI juga mewarnai kerja keras mesin diplomasi sepanjang tahun 2011.

Upaya yang telah dilakukan baik oleh Kementerian Luar Negeri maupun perwakilan RI terkait perlindungan WNI sangat beragam.

Saat ini, perlindungan bukan saja menyangkut perlindungan terhadap TKI, namun juga perlindungan segenap WNI sekiranya terjadi gejolak politik, bencana alam, dan hal-hal khusus seperti pembebasan sandera dan pembajakan.

Selama tahun 2011, sebanyak 38.884 WNI yang menghadapi suatu permasalahan telah kembali ke tanah air. Sebanyak 24.488 WNI diantaranya telah kembali dengan difasilitasi langsung oleh Pemerintah RI.

Terkait dengan upaya penyelamatan WNI dari pembajakan, dari 61 WNI yang telah menjadi korban penyanderaan perompak Somalia yang melibatkan 8 kapal beberapa Negara, saat ini seluruh ABK WNI telah diselamatkan. Tidak ada satupun ABK yang saat ini berada dalam pembajakan di Somalia. Pemerintah RI melalui perwakilan RI di Abuja telah bekerja keras untuk menyelamatkan WNI dari tindak penculikan di Nigeria.

Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, upaya khusus telah dilakukan untuk menyelamatkan kapal MV Sinar Kudus yang disandera di perairan Somalia. Dalam catatan Kemlu, misi penyelamatan kapal MV Sinar Kudus yang hanya membutuhkan waktu hanya 46 hari merupakan salah satu yang tercepat yang selama ini dilakukan untuk menyelamatkan kapal dari pembajakan di perairan Somalia.

Terkait dengan upaya perlindungan WNI yang terancam hukuman mati, berbagai upaya diplomasi dilakukan pada seluruh tingkatan, baik pada tingkat Kepala Negara secara langsung oleh Bapak Presiden, Menteri Luar Negeri maupun perwakilan RI di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri telah melakukan kajian yang mendalam mengenai perangkat hukum TKI di negara tujuan pengiriman TKI untuk memastikan ada tidaknya jaminan perlindungan bagi TKI di luar negeri. Kajian ini akan menjadi salah satu masukan bagi kebijakan menyeluruh terkait pengiriman TKI ke luar negeri.

Sepanjang tahun 2011, dengan upaya khusus dan arahan Bapak Presiden termasuk pembentukan Satgas, telah dibebaskan 35 WNI dari ancaman hukuman mati.

Dari WNI yang terancam hukuman mati, lebih dari 65 % karena kasus Narkoba dan 31 % karena kasus pembunuhan. Kasus hukum yang juga diancam hukuman serius di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Kedepan, disamping peningkatan upaya perlindungan WNI di luar negeri, termasuk melalui adanya kesepakatan bidang ketenagakerjaan dengan Negara setempat, diplomasi akan memberikan perhatian khusus terhadap upaya pencegahan dan deteksi dini.

Perlindungan dan keberpihakan kepada WNI di luar negeri merupakan amanat konstitusi.

Untuk terus memberikan perlindungan maksimal kepada TKI, upaya penyelesaian yang menyeluruh, dari hilir ke hulu merupakan suatu keniscayaan.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagai pemikiran akhir, kami menyadari betul, bahwa politik luar negeri hanya akan efektif jika terdapat rasa kepemilikan dan partisipasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2011, kerjasama dan konsultasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan parlemen berjalan sangat baik. Berbagai kerjasama pada akhirnya memberikan kesamaan pandangan dalam berbagai isu internasional yang menjadi kepentingan nasional Indonesia.

Kerjasama dan konsultasi senantiasa akan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Media massa juga memegang peranan penting.

Dalam era saat ini, media merupakan pilar politik luar negeri dan diplomasi.

Kami sangat menghargai kerjasama yang telah terjalin selama ini. Kami juga menyampaikan selamat bagi rekan-rekan media yang tahun ini mendapatkan Adam Malik Award.

Kami percaya kerjasama yang telah terjalin ini dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Adalah merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa politik luar negeri Indonesia dan diplomasi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

Hanya dengan itu, Indonesia akan memiliki peran dan pengaruh yang lebih besar diawasannya.

Hanya dengan itu pula, Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam forum global.

Hanya dengan itu pula, politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dapat diabdikan untuk kepentingan nasional.

Guna mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.